



ANALISA KEGAGALAN UPAYA PERDAMAIAN TURKI DENGAN PARTIYA KARKEREN KURDISTAN (PKK) TAHUN 2009-2015

Sheila Rosi Andika

Departement Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang.

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The prolonged separatist conflict that the Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) had with the Turkish government was caused by the failure of peace efforts between the two sides, hence raising questions about what caused the failure of the peace effort. Therefore, this article aims to analyze the factors behind the failure of peace efforts between Turkey and the PKK that occurred in 2009-2015. Using Charles Kupchan's stable peace theory. The article argued that the failure of the peace effort was due to Turkey's and the PKK's lack of compliance with Kupchan's stable peace criteria and conditions, as well as the failure of the peace process at the unilateral accommodation stage as both sides did not trust each other's commitments. Turkey assumed that if it continued the negotiation process, the PKK would increase their demands. Meanwhile, PKK assumed that the Turkish government was not serious about dealing with the Kurdish Question so that the peace effort was deadlocked.

Keywords: *Separatism, Kurdish Question, Deadlock*

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Turki dengan organisasi militan Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) telah terjadi selama puluhan tahun dan belum juga menemukan titik terang hingga saat ini. Konflik tersebut bermula dari kegagalan pemerintah Turki dalam memenuhi tuntutan etnis Kurdi untuk memperoleh kemerdekaan dan pembentukan negara Kurdistan pasca kejatuhan Kekaisaran Ottoman. Akibat dari runtuhnya kekaisaran ini, etnis Kurdi menjadi salah satu terbesar di Timur Tengah, dan penduduknya tersebar di berbagai wilayah seperti Turki, Iran, Irak, Suriah, hingga Armenia. Walaupun terkenal sebagai etnis dengan jumlah populasi yang besar, etnis ini terkenal karena tidak memiliki negara (Ozcelik, 2006).

Atas keresahan permasalahan yang dialami oleh etnis Kurdi ini, kemudian muncul istilah *Kurdish Question* untuk menggambarkan fakta bahwa orang-orang Kurdi tidak memiliki negara kewarganegaraan sendiri (Rabar, 2011). Etnis Kurdi menuntut adanya identitas nasional dan kepemilikan wilayah yang berdaulat pada negara-negara tersebut. Salah satu gerakan yang vokal dalam memperjuangkan *Kurdish Question* adalah PKK yang merupakan organisasi

militan dibentuk oleh Abdullah Ocalan di tahun 1978. PKK melawan pemerintah Turki dikarenakan merasa dikhianati telah melanggar janji dalam perjanjian Sevres untuk mendirikan negara Kurdistan. Akibat dari perselisihan tersebut, kedua pihak telah mengalami banyak kerugian baik secara materil hingga imateril.

Setelah melalui pasang surut konflik selama bertahun-tahun, pada akhirnya kedua pihak mengalami kemajuan untuk mengupayakan langkah-langkah perdamaian. Lewat Turkish Adalet ve Kalkınma (AKP) yaitu partai politik di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, mereka membentuk sebuah kebijakan bernama *Kurdish Opening* pada tahun 2009 sebagai bentuk kemajuan konflik yang terjadi antara pemerintah Turki dengan PKK. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik puluhan tahun, adapun terdapat beberapa isu yang kemudian menjadi masalah utama dan diangkat dalam kebijakan ini, antarlain untuk memberikan hak budaya yang lebih besar kepada orang-orang Kurdi, memberikan beberapa bentuk otonomi local, dan membujuk PKK untuk melakukan gencata senjata (Carneige Endowment for International Peace, 2009). Antara tahun 2008-2011, upaya perdamaian tersebut ternyata disertai dengan beberapa pertemuan rahasia yang dikenal dengannama *Oslo Process* yang dilakukan antara perwakilan tingkat tinggi dari *Milli Istihbarat Teskilati* (MIT) atau *National Intelligence Agency* milik Turki dan pemimpin dari PKK seperti Abdullah Ocalan, Zubeyir Aydar, Sabri Ok, Remzi Kartal, dan Adem Uzun dengan menggunakan mediator internasional di Osli, Norwegia (Crisis Group Europe Report, 2014).

Walaupun di tahun 2011 proses tersebut harus mengalami kegagalan karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh anggota PKK terhadap tentara Turki di distrik Silvan, kedua pihak merasa perlu untuk mempertahankan jalan dialog. Pada tahun 2013, Erdogan mengatakan bahwa perwakilan MIT sedang berdiskusi dengan Ocalan untuk membicarakan kelanjutan proses perdamaian. Dengan demikian sampailah pada tahap terakhir dalam pembicaraan damai ini dengan dibentuk kebijakan *Resolutioini Process*, yang ditandai dengan penarikan pasukan PKK dari wilayah Turki selama perayaan نوروز (dibaca Nowruz), selain itu mantan pemimpin PKK yaitu Ocalan membacakan langsung surat yang menyatakan bahwa PKK harus melakukan pelucutan senjata dan mengakhiri aksi terror dengan Turki yang sedang berlangsung selama puluhan tahun (Crisis Group Europe Report, 2014).

Sayangnya upaya damai tersebut harus berakhir Ketika pada tahun 2015 pihak PKK kembali melakukan serangan kepada angkatan bersenjata Turki. Dengan adanya serangan yang dilakukan PKK ini kemudian merusak kesepakatan damai yang sudah dilakukan kedua belah pihak dan mengakhiri gencatan senjata yang sudah terjadi selama lebih dari dua tahun. Upaya damai ini kemudian kembali mengalami *deadlock* atau kebuntuan. Kepercayaan yang sudah dibangun oleh dua belah pihak harus musnah akibat adanya serangan yang terus menerus dilakukan oleh pihak PKK, sehingga untuk menemukan kata damai dalam konflik ini sulit dilakukan. Tidak jarang perlawanan dibalas dengan perlawanan juga, hal inilah yang kemudian mengakibatkan konflik tersebut menjadi berkepanjangan dan belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam penelitian ini saya akan meneliti faktor kegagalan upaya damai antara pemerintah Turki dengan PKK yang dimulai dari tahun 2009 dan selesai di tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, **“Mengapa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap PKK dari tahun 2009-2015 mengalami kegagalan?”**

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rosyidin berjudul “Mengapa Negosiasi Internasional Gagal? Menjelaskan Kegagalan Denuklirisasi Amerika Serikat-Korea Utara 2019” (Rosyidin et al., 2021), menggunakan kerangka berpikir *Stabel Peace* milik Charles Kupchan (Kupchan, 2010). Dalam buku “How Enemies Become Friends” milik Kupchan, dia berpendapat bahwa gagal atau tidaknya negosiasi dipengaruhi oleh tindakan atau interaksi yang terjadi antara pihak yang berselisih, apabila kedua pihak berkomitmen untuk mengakhiri perselisihan maka akan menciptakan perdamaian. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir milik Kupchan tentang *stable peace* sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah.

Damai dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi di mana kita dapat hidup saling berdampingan ditengah-tengah banyaknya perbedaan. Tidak ada kekerasan, permusuhan, dan tidak ada konflik yang terjadi, sehingga timbulah suasana yang rukun, nyaman, serta harmonis. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana kondisi damai ini dapat terjadi. Menurut Charles Kupchan, dalam bukunya yang berjudul *How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace*. Kedamaian akan tercipta melalui tindakan dan interaksi para aktor, sehingga dalam pernyataannya ini diplomasi merupakan faktor fundamental dalam perdamaian. Sehingga untuk menciptakan perdamaian dibutuhkan tiga komponen yaitu demokrasi, hak asasi manusia, serta dialog politik yang dia sebut sebagai kondisi dan kultur yang kondusif. Teori *Stable Peace* akan melihat apakah kondisi tersebut sudah terpenuhi dan mempengaruhi proses perdamaian. Apabila tidak maka proses perdamaian akan sulit tercapai dan tidak stabil. Kupchan berpendapat bahwa perdamaian bukan hanya sekedar tidak ada konflik atau permusuhan, melainkan adanya kondisi di mana pihak yang saling berkonflik tidak lagi memegang senjata dan saling berkomitmen untuk menyelesaikan permusuhan mereka menggunakan cara-cara yang damai, sehingga terciptalah perdamaian yang stabil (Kupchan, 2010).

Kupchan menyimpulkan bahwa kemunculan perdamaian yang stabil paling baik dijelaskan melalui teori berorientasi proses. Dia menjelaskan terdapat empat tahapan dalam proses perdamaian, yaitu ada *unilateral accommodation*, *reciprocal restraint*, *social integration*, dan terakhir merupakan tahap *generation of new narratives*. Keempat tahap ini harus dilakukan oleh pihak yang memiliki konflik agar menciptakan perdamaian yang stabil. Tahap pertama yaitu *unilateral accommodation*, yaitu tahap di mana salah satu pihak yang dihadapkan oleh berbagai macam ancaman berusaha untuk menghilangkan sumber ancaman tersebut dengan melakukan pengekangan strategis dan membuat konsesi kepada musuh. Konsesi tersebut merupakan sebuah tawaran perdamaian sebagai langkah pembuka untuk memberikan sinyal damai kepada lawan.

Tahap kedua adalah *reciprocal restraint*, yaitu tahap di mana pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar konsesi dan kedua pihak berkomitmen untuk menjauh dari permusuhan. Mereka sepakat untuk tidak saling melakukan tindakan yang nantinya dapat merusak komitmen tersebut. Dengan adanya komitmen ini maka akan semakin membuka proses perdamaian. Ketiga ada *societal integration* yang merupakan tahap di mana kedua pihak saling meningkatkan interaksi untuk membangun rasa saling percaya satu sama lain. Terakhir adalah *generation of new narratives* yaitu tahap ketika kedua pihak menciptakan narasi-narasi baru yang tercipta melalui pernyataan elit, budaya populer (media, sastra, teater) dan barang-barang dengan simbolisme. Dengan adanya narasi baru ini diharapkan dapat mengikis perbedaan dan meningkatkan solidaritas bersama. Sehingga menjadi permulaan perdamaian yang stabil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif analitik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan yang mendasari gagalnya

proses perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Turki dengan PKK. Jangkauan penelitian ini adalah sejak dibentuknya kebijakan *Kurdish Opening* pada tahun 2009 sampai berakhirnya kebijakan *Resolution Process* di tahun 2015.

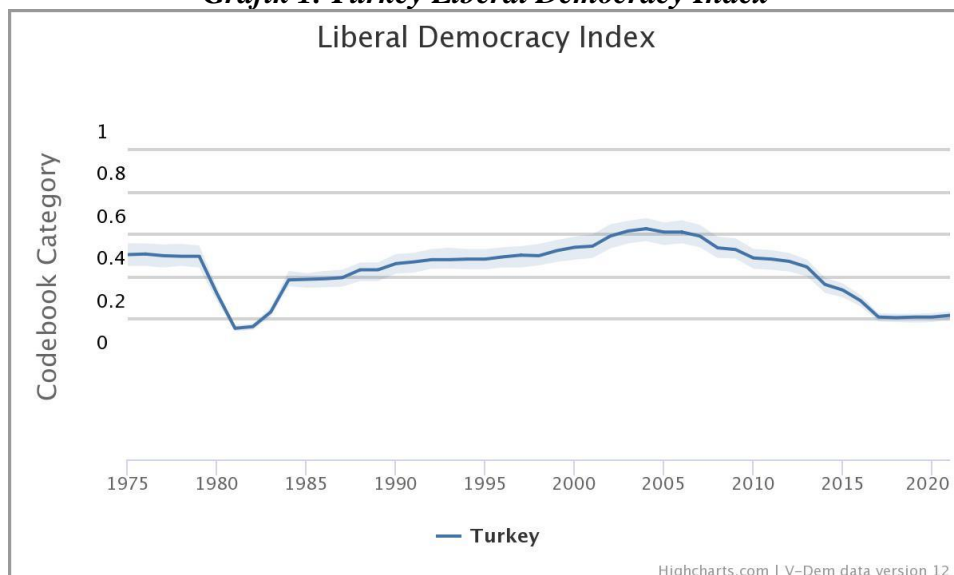
PEMBAHASAN

UPAYA PROSES PERDAMAIAN PEMERINTAH TURKI DAN PKK

Dalam teori *Stable Peace*, Charles Kupchan menjelaskan bahwa perdamaian yang stabil harus didasarkan pada kondisi dan kultur yang kondusif, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan dialog politik. Jika salah satu pihak mempertahankan posisi yang tidak fleksibel dan tidak memenuhi hak-hak yang sama bagi setiap individu, maka perdamaian akan sulit untuk tercapai dan stabil. Oleh karena itu, analisis proses perdamaian Turki dan Partiya Kakeren Kurdistan melalui teori *Stable Peace* akan melihat apakah kondisi dan kultur yang kondusif sudah terpenuhi dan mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian. Jika tidak, maka proses perdamaian akan sulit untuk tercapai dan stabil (Kupchan, 2010).

Melihat kondisi dan situasi dari negara Turki sendiri yang memiliki indeks demokrasi, hak asasi manusia, serta dialog politik yang masih rendah, hal ini kemudian menjadi sebuah faktor mendasar sulitnya mencapai proses perdamaian. Berdasarkan data *Liberal Democracy Index* dari V-Dem, indeks ini menggabungkan informasi tentang hak suara, kebebasan dan keadilan pemilu, kebebasan berserikan dan berekspresi, kebebasan sipil, dan batasan eksekutif. Dari data tersebut angka menunjukkan siklus yang fluktuatif.

Grafik 1. Turkey Liberal Democracy Index



Sumber: *Turkey Liberal Democracy Index*. V-Dem data version 1.2. https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/

Walaupun sempat kembali stabil pada tahun 1990an, Ketika Turki mulai berbenah memperbaiki kondisi negaranya untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, yaitu dengan memberikan hak penyiaran dan menamai anak-anak mereka dalam bahasa mereka sendiri serta mempelajari bahasa mereka, penghapusan hukuman mati, dan pencabutan keadaan darurat. Pada tahun 2004, demokrasi Turki mengalami kemunduran kembali, hal ini memperlihatkan bahwa selama pemerintahan AKP yang dipimpin oleh Erdogan demokrasi liberal milik Turki

mengalami penurunan (Meyersson, 2016). Penurunan ini disebabkan oleh AKP yang mengadopsi wacana liberal hanya karena kebutuhan, tanpa terlalu memikirkan atau melalui transformasi ideologis yang nyata. Begitu Partai meraih kekuasaan, kader dan orang-orang di belakang Erdogan menemukan kekayaan, prestise, dan kemuliaan yang belum pernah mereka miliki. Sehingga tekad mereka berubah hanya untuk menjaga dan mempertahankan apa yang mereka punya terlepas dari apa artinya demokrasi bagi Turki (Akyol, 2021).

Kupchan mengatakan bahwa teori berorientasi proses membantu menjelaskan munculnya perdamaian stabil. Ada empat tahapan dalam proses perdamaian: (1) *Unilateral accommodation*, (2) *Reciprocal restraint*, (3) *Societal Integration*, dan (4) *Generation of new narratives*. Kedua belah pihak harus melalui keempat tahapan ini untuk menciptakan perdamaian yang stabil. *Unilateral accommodation* adalah tahap pertama dimana pihak membuat konsensi untuk menghilangkan ancaman. *Reciprocal restraint* adalah tahap kedua dimana kedua pihak berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang merusak. *Societal Integration* adalah tahap ketiga dimana kedua pihak meningkatkan interaksi untuk membangun rasa percaya. *Generation of new narratives* adalah tahap terakhir dimana kedua pihak menciptakan narasi baru untuk mengikis perbedaan dan meningkatkan solidaritas.

Konflik Kurdi di Turki masih menjadi studi kasus yang membingungkan dan kompleks. Berusia lebih dari satu abad, konflik yang berlarut-larut ini dapat ditelusuri kembali ke proses pembangunan negara dan pembentukan nasional yang keras pada abad 20 yang menyebabkan kekecewaan dan politik identitas yang dalam. Di Turki, populasi Kurdi yang besar mengalami diskriminasi politik dan ekonomi dengan pembatasan yang sangat berat terhadap identitas dan hak-hak sipil mereka. Kurdi dilarang bebas mengekspresikan budaya, bahasa, dan tradisi mereka, dan yang lebih buruk, eksistensi mereka ditolak. Kebalikan besar kekuatan antara Negara Turki yang terpusat dan masyarakat Kurdi miskin yang terpinggirkan menyebabkan beberapa pemberontakan Kurdi pada tahun 1920-an dan 1930-an yang ditumpas dengan brutal. Perjuangan bersenjata dilanjutkan kembali pada tahun 1984 oleh PKK, dengan bentrokan kejam antara pemberontak Kurdi dan tentara Turki yang terus berlanjut, mengakibatkan kematian sekitar 40.000 orang, pembakaran dan pengungsian paksa lebih dari 5.000 desa Kurdi, kerusakan lingkungan yang parah, dan pengungsian internal lebih dari satu juta orang (Savran, 2020).

PKK meminta identitas etnis Kurdi dikenali dan agar mereka bisa bebas menjalankan hak-hak sipil mereka melalui jaminan konstitusional. Mereka juga mencari bentuk otonomi di daerah Kurdi bagian timur dan tenggara di mana mereka terkonsentrasi. Di sisi lain, Turki khawatir bahwa langkah-langkah seperti itu akan mengarah pada pemisahan Kurdi dan pemikiran tentang mengakui identitas Kurdi dipahami sebagai ancaman bagi interpretasi tunggal negara yang berlangsung lama selama masa Kemalist. Di sini terletak tidak cocoknya konflik. Oleh karena itu, sangat mengejutkan banyak orang, termasuk pengamat luar, ketika pemerintah, yang dipimpin oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), pada tahun 2009 mengumumkan inisiatif perdamaian pertamanya, *Kurdish Opening*, yang merupakan usaha politik pertama untuk menyelesaikan konflik. Meskipun kebijakan tersebut berakhir secara tiba-tiba pada tahun 2011 karena krisis politik dan kurangnya komitmen, proses ini kembali berlanjut pada akhir 2012 saat proses perdamaian yang lebih publik, serius, dan formal diumumkan oleh pemerintah. Proses ini kadang-kadang disebut sebagai *Solution Process* atau "proses Imrali" (Imrali merujuk ke pulau penjara Ocalan). Proses baru ini tergantung pada dua elemen utama: pembicaraan berkelanjutan antara pejabat negara dan PKK dan implementasi reformasi yang memastikan demokratisasi dan pengakuan hak budaya dan politik Kurdi. Namun dengan intensifikasi perang di wilayah tersebut, perubahan keseimbangan kekuasaan, dan tegangan dan perbedaan yang kuat terkait peristiwa di Suriah tetangga, proses perdamaian resmi runtuh pada musim panas 2015 (Savran, 2020).

Adapun upaya proses perdamaian antara pemerintah Turki dan PKK pada tahun 2009-2015 meliputi dialog politik antara pemerintah dan PKK, yaitu pemerintah Turki memulai dialog politik dengan PKK untuk mencari solusi atas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Penurunan tingkat kekerasan, pemerintah dan PKK membuat komitmen untuk mengurangi tingkat kekerasan dan membatasi aksi-aksi kekerasan. Pembentukan komisi kerja, pemerintah dan PKK membentuk komisi kerja untuk membantu proses perdamaian dan membahas masalah yang dihadapi oleh komunitas Kurdi. Program reformasi sosial dan ekonomi, pemerintah meluncurkan program reformasi sosial dan ekonomi untuk membantu komunitas Kurdi dan memperkuat basis perdamaian. Peningkatan partisipasi politik, pemerintah meningkatkan partisipasi politik bagi komunitas Kurdi dengan memperluas hak-hak politik dan meningkatkan pengakuan atas identitas Kurdi (Savran, 2020).

Meskipun perubahan dalam konflik dan langkah-langkah positif yang diambil pada tahun 2013, proses perdamaian menghadapi hambatan besar. Turki tidak memperlihatkan kematangan yang diperlukan untuk resolusi. Masalah tawar-menawar muncul sejak awal dalam proses. Tidak ada upaya dan tekad politik yang cukup untuk menciptakan situasi saling menguntungkan bagi kedua pihak saat mengatasi masalah utama yang ada di dasar konflik. Turki ingin membuat sedikit konsesi sebanyak mungkin (misalnya, pembongkaran senjata). Pemerintah AKP berpikir bahwa transformasi struktural yang diperlukan untuk resolusi bisa dihindari dan masih bisa dicapai. Sehingga, pendapat ini merusak kepercayaan karena PKK kehilangan keyakinan pada upaya proses perdamaian kedua belah pihak. Konsesi pada akhirnya melibatkan pemberdayaan kelompok terpinggirkan. Gerakan politik Kurdi terus meminta undang-undang yang sesuai diterima untuk memungkinkan penerapan hak-hak Kurdi dan melindungi perundingan perdamaian dari ancaman hukum yang berasal dari nasionalis yang memosisikan proses perdamaian. Namun, pemerintah dituduh seolah-olah memperlambat proses meskipun PKK melanjutkan proses penarikan. Parlemen Turki akhirnya menyetujui paket demokratisasi pada awal 2014, namun sangat dasar dan jauh dari memuaskan kebutuhan Kurdi. Karena tidak ada tuntutan utama Kurdi (seperti otonomi, pengakuan konstitusional, pendidikan) yang diterima, bahkan pada tingkat moderat pun kemajuan sedikit tercapai (Savran, 2020).

Studi pustaka menunjukkan bahwa tahap *Unilateral Accommodation* gagal diterapkan pada proses perdamaian antara Turki dan PKK. Dalam hal ini, salah satu pihak yaitu pemerintah Turki telah mengawali memberikan konsesi kepada PKK lewat *Kurdish Opening* pada tahun 2009, namun dalam rangkaian proses perdamaian sampai *Solution Process* di tahun 2012 ditanggapi dengan tidak baik oleh pihak PKK yang mengakibatkan mencetusnya kembali konflik bersenjata antara kedua pihak. Mereka menganggap bahwa pihak Turki kurang memenuhi tuntutan mereka sebagai orang Kurdi yang meliputi pengakuan identitas, otonomi, pengakuan konstitusional, serta Pendidikan. Di satu sisi pihak Turki juga membuat konsesi tersebut dengan tujuan untuk pelucutan senjata sebab mereka khawatir PKK akan kembali melakukan pemberontakan, yang ditolak oleh PKK. Sehingga memunculkan rasa tidak percaya satu sama lain. Oleh karena itu, proses perdamaian tersebut tidak dapat berlanjut ke tahap-tahap berikutnya seperti *Reciprocal Restraint*, *Societal Integration*, dan *Generation of New Narratives*. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kemauan bersama untuk mencapai solusi damai yang berkesinambungan, kondisi politik dan ekonomi yang tidak kondusif, serta adanya kepentingan yang bersebrangan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian alasan perdamaian yang stabil belum juga tercapai dikarenakan lebih kepada PKK yang menghambat proses damai tersebut. Pada awalnya tujuan dari dibentuknya PKK adalah untuk mendirikan negara Kurdistan yang merdeka di wilayah tenggara Turki. Namun seiring dengan berjalannya waktu tujuan tersebut berubah menjadi tuntutan untuk

pemenuhan hak otonomi bagi orang-orang Kurdi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2005 dibentuklah Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di wilayah Iraq Utara, dengan demikian mengubah parameter utama dari *Kurdish Question* untuk menuntut adanya hak otonomi di Turki bagian tenggara. Setelah pembentukan KRG pada tahun 2005, KCK sebagai organisasi payung yang menyatukan berbagai macam partai yang berafiliasi dengan PKK di seluruh wilayah Kurdi membingkai ulang masalah Kurdi dalam hal “status” (Çiçek, 2018).

Akibatnya pada tahun 2007, PKK mengubah usulan pembentukan negara Kurdistan yang merdeka menjadi mengusulkan pembentukan otonomi demokratis untuk Kurdi yang mendiami Turki. Dalam otonomi demokratis tersebut hak-hak yang diperjuangkan mengacu kepada pengakuan hak budaya kolektif untuk Kurdi dan pembagian kekuasaan antara pemerintah lokal dan regional dan pemerintah pusat. Demokrasi lokal berbasis komunitas ditawarkan sebagai alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah Kurdi dan juga untuk kebijakan baru yang dapat mengakomodasi identitas etnis atau nasional dan agama atau sekuler di Turki secara lebih umum, Bersama dengan kesetaraan berbasis gender dan kelas (Çiçek, 2018). Kementerian Luar Negeri menyerahkan bukti ke Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri 2018 tentang ‘aspirasi Kurdi dan Kepentingan Inggris’, yang mencakup pengamatan tentang bagaimana pandangan tentang kemerdekaan Kurdi yang berkembang:

“(...) While the PKK’s original objective was to achieve Kurdish independence from Turkey, since the 1990s this objective has changed. Öcalan now claims to advocate ‘democratic autonomy’ for Kurds, with a focus on equal cultural and political rights within the Turkish state rather than secession. The HDP / BDP have supported the “democratic autonomy” vision, with a particular declared focus on respect for minority rights” (BBC Monitoring, 2017).

Pergeseran signifikan mengenai tuntutan dan tujuan dari PKK, yang semula pemisahan diri menuju otonomi demokratis, dibenarkan oleh fakta bahwa penduduk Kurdi di Turki tersebar secara geografis. Pada tahun 2005, PKK mengumumkan bahwa tujuan awal pembentukan negara Kurdistan telah menjadi penghalang menuju kebebasan dan tujuan strategis yang baru adalah untuk pembentukan “jaringan dewan yang saling terkait sebagai dasar penentuan nasib sendiri dan sarana untuk hidup bersama.” (Jongerden, 2017). Perubahan tujuan ini tidak berarti bahwa PKK menyerah pada klaimnya untuk menentukan nasib sendiri, sebaliknya hal tersebut telah mengembangkan pemahaman baru tentang demokrasi radikal yang hanya akan mungkin terjadi melalui keterlibatan aktif warga negara.

Namun nampaknya dari pihak Turki sendiri tidak dapat menerima tuntutan hak otonomi tersebut, sebab apabila Turki menyetujui pemenuhan otonomi, maka ditakutkan akan terjadi referendum kemerdekaan seperti yang terjadi di Irak Utara oleh KRG. Kepala Staf Umum Turki, İlker Başbuğ mengatakan bahwa:

“Nobody can demand or expect Turkey to make collective arrangements for a certain ethnic group in the political arena, outside of the cultural arena, that would endanger the nation-state structure as well as the unitary state structure.” (Yegen, 2011).

Selama pembicaraan damai, pemerintah AKP mencapai batas kesediaannya untuk berkompromi dengan menawarkan untuk mengakui hak-hak sipil bagi etnis Kurdi, yang mencakup pengakuan *folkloric identity* Kurdi yang dimaksudkan untuk mengizinkan bahasa Kurdi, mengizinkan terdakwa yang berbicara bahasa Kurdi untuk menggunakan penerjemah di pengadilan, membuka jurusan bahasa Kurdi di universitas terpilih, pembukaan saluran TV dengan bahasa Kurdi, dan sebagainya (Çiçek, 2013). Namun Erdogan menggunakan bahasa

yang ambigu mengenai Pendidikan dalam bahasa Kurdi, untuk mengadili orang Kurdi dan tidak meningkatkan kebencian di antara orang Kurdi sampai berakhirnya proses perdamaian pada tahun 2015 (Çiçek, 2011). Pembicaraan pers Erdogan setelah dia menyangkal pembicaraan Dolmabahce terungkap. Erdogan mengungkapkan pendapatnya mengenai:

“Did we put optional courses in mother language within our education system? Done. What else do you want? Do you suggest that it be required? How come something like this happens? This country has one official language. (If you give this up), you cannot stop other demands.” (Al Jazeera, 2015).

Tercatat bahwa sebanyak 3 – 15 juta etnis Kurdi mendiami Turki (Mutlu, 1996), namun hanya sebanyak 4.000 – 5.000 orang yang berafiliasi menjadi anggota PKK (U.S. Department of State, 2019). Menunjukkan bahwa hanya sedikit dari etnis Kurdi yang mendiami Turki kemudian setuju dan mau bergabung dengan PKK sebagai organisasi militan yang mengangkat senjata. Namun, akibat adanya ketidakseriusan yang membuat langkah Turki menjadi ambigu tersebut menurunkan sikap percaya orang-orang Kurdi yang sebelumnya telah dibangun oleh AKP pada *Kurdish Opening* di tahun 2009.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka membuktikan bahwa perdamaian yang stabil akan sulit dicapai apabila dari masing-masing pihak tidak memiliki komitmen yang nyata untuk membawa perdamaian ke jalur yang lebih serius. Turki dan PKK seharusnya saling meningkatkan rasa percaya agar proses perdamaian dapat berjalan dengan baik tentunya dibarengi dengan sikap yang nyata sehingga memperlihatkan komitmen yang ditawarkan pada awal tahap negosiasi. Sehingga konflik dapat cepat terselesaikan dan kedua belah pihak dapat mencapai kata damai yang stabil dan berkelanjutan.

FAKTOR KEGAGALAN PROSES PERDAMAIAN TURKI DAN PKK DARI SUDUT PANDANG TURKI

Proses perdamaian antara Turki dan PKK sejatinya memiliki ancaman langsung terhadap *status quo* karena melibatkan perubahan hubungan kekuasaan, membuat kemajuan pada proses perdamaian dari kedua pihak sangat sulit untuk dicapai. Sehingga situasi ini menjadi rumit karena, seperti yang dicatat oleh *Sites* yang dikutip dari Savran (Savran, 2020) “meminta mereka untuk menyerahkan kekuasaan kemungkinan memuaskan kebutuhan seperti yang mereka lihat atau rasakan dari perspektif mereka sekarang”. Kemudian pada tahun 2014, PKK mulai menghentikan proses penarikan pasukannya karena tidak puas dengan proses reformasi. Hubungan antara pihak konflik menjadi lebih tegang setelah laporan bahwa militan PKK mulai kembali ke Turki dari Kurdistan Irak pada musim semi 2014. Komitmen PKK terhadap proses perdamaian mulai merosot. Mereka sudah mulai memperkuat kehadiran mereka di kota dan jaringan pemuda di wilayah Kurdi timur dan tenggara Turki pada tahun 2013. Ini menyebabkan pemerintah menuduh mereka menggunakan proses perdamaian untuk memperkuat pemuda dan mengumpulkan senjata sehingga mempersiapkan perang. Meskipun masih ada negosiasi dan ada gencatan senjata, kedua belah pihak tidak meninggalkan kekerasan dan tidak mengerti dampaknya selama pembicaraan dan konflik memburuk. Setiap komitmen terhambat oleh pengkhianatan kekerasan dan karena pengelolaan yang buruk tentang potensi pembangunan kepercayaan dan kesempatan (misalnya insiden Habur, krisis Kobane).

Situasi semakin memburuk dan ketidakpercayaan semakin meningkat saat proses resolusi mengalami krisis serius pada bulan Oktober 2014, saat kota perbatasan Suriah Kobane dikepung oleh ISIS (الدولة الإسلامية في العراق والشام) atau Negara Islam Irak dan Syam) bersenjata

lengkap. Kemudian, Pemerintah Turki dengan tegas menolak untuk membantu perlawanan etnis Kurdi di Kobane, yang hanya memiliki senjata seadanya melawan ISIS yang siap tempur. Inilah saat Erdogan terkenal karena menyatakan bahwa Kobane akan jatuh dalam waktu sekejap dan kemudian menyebut partai utama Kurdi Suriah PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat) dan sayap bersenjata YPG/J (Yekîneyên Parastina Gel) sebagai organisasi teroris (DW, 2014). Komitmen yang sangat tinggi dari Presiden Erdogan mengakibatkan semakin kuatnya citra musuh Turki di mata Kurdi, tidak hanya dari Kurdi di Turki namun juga empat bagian Kurdistan yang terpecah. Seorang pejabat senior AKP menyatakan “Tidak ada tragedi di Kobane seperti yang dikutuk oleh grup teroris PKK. Ini adalah perang antara dua kelompok teroris”.

Presiden Erdogan menggunakan ancaman PKK yang dipercayainya di Suriah untuk memperkuat rasa ketidakamanan nasional dan pribadi masyarakat Turki, yang memperkuat nasionalisme Turki dan pada akhirnya merusak sedikit keberhasilan yang telah dicapai dari proses perdamaian (seperti memperkaya ruang publik, optimisme publik tentang masa depan dan memperbaiki prospek rekonsiliasi). Sebaliknya, Pemerintahan AKP memutuskan proses perdamaian untuk menghadapi ancaman baru ini dengan cara militer yang bertujuan untuk membubarkan kontrol PYD di utara Suriah dan kontrol PKK di Sinjar, Irak, sehingga memperoleh posisi tawar yang dominan kembali. Biasanya, salah satu pihak percaya bahwa mempertahankan posisi unggul atas lawan adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan keamanan nasional. Sebenarnya, semakin banyak partisipasi politik dari kelompok etnis subordinat, semakin tidak aman masyarakat dominan tentang implikasinya terhadap tatanan yang ada. Kemudian, "Semakin tidak aman kelompok dominan, semakin mereka menentang tuntutan politik dari kelompok etnis subordinat dan semakin besar kemungkinan konflik berkepanjangan" (Crighton, E. & M.A. Mac Iver, 1991). Turki menjadi sangat takut dan tidak pasti dengan perkembangan regional dan penguatan Kurdi baru. Dipikir bahwa kembali ke perang akan menghentikan pergeseran kekuatan negatif, mencegah penyebaran tambahan pengaruh PKK di wilayah tersebut, dan sehingga memulihkan kepastian *status quo*.

Dari sudut pandang pemerintah Turki, kegagalan proses perdamaian tersebut terjadi karena adanya isu terorisme di mana pemerintah Turki menganggap PKK sebagai organisasi teroris dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berdamai dengan kelompok tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengatakan dalam konferensi pers di Ankara bahwa tidak mungkin untuk melanjutkan proses perdamaian dengan militan Kurdi dan akan mendesak parlemen untuk menghapus politisi yang memiliki hubungan dengan mereka dari kekebalan hukum, Erdogan menyatakan “Tidak mungkin kita melanjutkan proses perdamaian dengan mereka yang mengancam persatuan dan persaudaraan nasional kita.” (Karadeniz, Tulay, 2015).

Adapun keengganan dari pemerintah Turki untuk membahas masalah hak-hak sipil orang Kurdi yang menjadi dasar tuntutan mereka selama ini, terdapat ketakutan dikalangan pemerintah bahwa cepat atau lambat mereka akan membuka pintu bagi gelombang permintaan yang tidak dapat diterima. Menurut seorang mantan anggota Dewan Eksekutif Sentral AKP, “tidak ada yang salah dengan permintaan PKK, tetapi pemerintah selalu khawatir, apakah permintaan PKK akan berhenti di sana?” Seorang pemimpin pro-PKK setuju: “Turki juga adalah ‘kita’ ... tetapi orang-orang Turki memiliki rasa takut dalam gen mereka bahwa ‘jika kita memberikan apapun kepada Kurdi, kita tidak akan dapat menghentikannya” (Savran, 2020).

Kekuatan militer PKK yang dinilai cukup kuat juga menjadi salah satu faktor, hal ini yang membuat pemerintah Turki merasa tidak nyaman untuk bernegosiasi dengan mereka. Bercermin pada konflik melawan anggota ISIS di Suriah dan Irak, tidak disangka perang tersebut memiliki konsekuensi tak terduga untuk memberdayakan PKK dan afiliasinya di

Suriah. Pemberdayaan territorial, militer, elektoral, dan politik gerakan Kurdi yang sebagian besar dihasilkan dari pertarungan dengan ISIS memicu konfrontasi daripada kerja sama dengan Turki. Alasannya adalah pemberdayaan PKK yang tiba-tiba dan besar telah secara signifikan meningkatkan ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidakamanan Turki. Pemerintah menuduh PKK menggunakan proses perdamaian untuk menunda guna memperluas pengaruh politik dan militer di wilayah tersebut (Väyrynen, R., 1991).

FAKTOR KEGAGALAN PROSES PERDAMAIAN TURKI DAN PKK DARI SUDUT PANDANG PARTIYA KARKEREN KURDISTAN (PKK)

Terdapat ketidakseriusan pemerintah Turki terhadap komitmennya untuk mengatasi masalah Kurdi menjadi salah satu faktor kegagalan proses perdamaian menurut PKK. Adanya ketidakseriusan ini terjadi karena pemerintah Turki memiliki obsesi dan ketakutan akan keamanan dan integritas teritorialnya. Terlebih ketika Kurdi Irak memperoleh otonomi berkat Konstitusi Irak yang baru kemudian membentuk *Kurdistan Regional Government* (KRG) semakin memberikan ketakutan apabila gerakan Kurdi di Turki juga mengikuti jejak mereka (Aktar, Cengiz, 2014).

Selain itu munculnya otonomi Kurdi di utara Suriah adalah fakta bagi Pemerintah dan Negara Turki, ditakutkan dianggap sebagai kesempatan nyata untuk pemilihan nasib sendiri bagi orang-orang Kurdi. Mereka khawatir ini memiliki potensi untuk mempengaruhi Kurdi Turki untuk mencari otonomi pada skala yang lebih besar, bahkan sekularisme, dan dengan logika ini membahayakan persatuan dan integritas wilayah Turki. Benar-benar, seperti yang dikomentari Zartman pada Kurdi, "Tidak ada kelompok etnis lain di wilayah ini yang dapat mengklaim kualitas proto-negara." (I.W. Zartman, 2017). Mereka tidak pernah menyetujui secara de facto setelah disintegrasi negara Suriah dan deklarasi otonomi sepihak oleh Kurdi Suriah, hal ini dikarenakan adanya hubungan kekerabatan antara Kurdi Suriah dan Turki, perbatasan Turki dengan Suriah tidak memiliki demarkasi alami, dan secara sewenang-wenang membagi desa-desa Kurdi (Aktar, 2014). Pemerintah dan Negara Turki sangat terkejut dengan prospek "negara PKK" yang berkelanjutan di sepanjang perbatasan selatan, dengan argumen bahwa "PYD/PKK" akan menggunakan wilayah tersebut untuk meluncurkan serangan ke Turki (Bayramoğlu, 2015). Sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa komitmen yang diberikan oleh Turki kepada PKK untuk mengatasi masalah Kurdi tidak dianggap serius.

Adanya kebijakan pemerintah Turki yang melarang aktivitas PKK, diskriminasi terhadap komunitas kurdi dan tindakan kekerasan dan penangkapan aktivis PKK oleh pemerintah Turki semakin mempersulit proses perdamaian. Dalam wawancara dengan media Turki Bianet, Bayik juga mengatakan, "Jika negara Turki, Erdogan, dan AKP membebaskan para tahanan yang mereka penjarakan, menghentikan pembunuhan politik dan semua operasi militer dan lainnya, menerima dan menyatakan negosiasi untuk menyelesaikan *Kurdish Question*, menerima gencatan senjata, memperbaiki kondisi Pemimpin PKK Abdullah Ocalan, menyediakan lingkungan yang bebas untuk negosiasi dan menjadikan Ocalan sebagai negosiator utama, membentuk delegasi pemantauan untuk gencatan senjata, segera memulai negosiasi, menerima keberadaan pihak ketiga yang objektif dan memberikan persyaratan ini, kami siap untuk segera mengumumkan gencatan senjata." (Behdinin, 2015).

Sebagai sebuah organisasi, PKK memandang perdamaian sebagai hal yang penting, tetapi mereka juga memandang bahwa perdamaian harus didukung oleh pemerintah Turki dengan tindakan yang konsisten dan nyata. Direktorat Dewan Eksekutif KCK (Kurdistan Democratic Communities Union), Cemil Bayik membuat pernyataan tentang selesainya

gencatan senjata yang berlangsung selama 2.5 tahun, bahwa “Gerakan Kebebasan kami tidak akan lagi menerima eksploitasi posisi gencatan senjata kami, dan akan mengambil sikap terhadap kebijakan yang telah meninggalkan *Kurdish Question* yang tidak terselesaikan, kami tidak akan lagi mentolerir mereka yang mengeksploitasi kesabaran dan posisi wajar kami dan penangkapan yang menargetkan gerakan politik Kurdi” (Hafiza Markezi, 2015).

Pada 6 Oktober, kaum Kurdi berdemonstrasi untuk memprotes posisi pasif dari pemerintah. Demonstrasi ini dengan cepat tak terkendali dan berubah menjadi bentrokan jalanan yang sangat kejam antara pemuda Kurdi dan polisi serta antara pemuda pro-PKK dan pro-Hizbullah Kurdi. Dalam beberapa hari saja, 51 orang meninggal. Kemarahan Kurdi dan ketakutan Turki yang dihasilkan juga menyebabkan pertempuran singkat di medan perang. Namun, pihak-pihak berhasil tenang saat menyadari alternatifnya adalah perang saudara dan segera kembali ke meja negosiasi. Hasilnya adalah *Persetujuan Dolmabahçe* (Savran, 2020).

Sementara itu, PKK, seperti yang disebutkan, mengalami perubahan besar dan cepat dalam hubungan kekuasaan memperkuat gerakan secara dramatis. Setelah ISIS mulai melancarkan serangan di daerah Kurdi di Suriah dan Irak pada tahun 2014, wilayah menjadi lebih kompleks dan menantang dengan aliansi dan keseimbangan kekuatan bergeser dalam cara yang mengejutkan. Ketika PKK dan YPG/J Kurdi Suriah datang untuk membela orang Kurdi serta memulihkan minoritas terkenal seperti Kurdi Yezidi dan Kristen (dimana tentara nasional gagal), legitimasi dan simpati internasional untuk gerakan tersebut meningkat secara signifikan. PKK dan YPG/J juga memperoleh dorongan besar dalam tingkat rekrutmen setelah serangan ISIS dan setelah kemenangan di Kobane. PKK memperluas kendali wilayah di Sinjar, Irak utara dan memiliki pengaruh terhadap partai saudaranya PYD di Suriah. Kelompok pemberontak tidak seperti negara bukan merupakan entitas teritorial, meskipun mereka bisa jika mereka menjadi lebih kuat (C. Butler & S. Gates, 2009).

Pengaruh PKK di semua empat bagian Kurdistan lebih kuat daripada sebelumnya, bahkan di Irak di mana tradisional lebih lemah karena kompetisi dengan partai politik Kurdi lainnya. Apa yang meningkatkan kekhawatiran Turki adalah aliansi antara AS dan YPG/J. Kurdi menjadi pejuang paling efektif melawan ISIS tidak terlewatkan oleh Amerika. Balasannya, Kurdi Suriah berharap memperoleh dukungan AS untuk memperkuat tuntutan otonomi mereka dalam negosiasi dengan Damaskus serta untuk memotivasi invasi militer Turki yang potensial.

PKK pada saat itu lebih kuat dan memiliki keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka juga kehilangan minat dalam perjanjian untuk memulai proses pemusnahannya karena mereka merasa bahwa mereka berada pada puncak kekuatannya pada saat itu. Perubahan yang cepat dan nyata dalam kekuatan PKK membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak hanya dapat memperoleh tetapi juga mempertahankan kontrol fisik atas wilayah timur laut Kurdistan di Turki seperti yang pernah mereka coba lakukan sebelumnya. Namun, yang lebih penting adalah PKK kehilangan keyakinan terhadap pemerintah Turki setelah krisis Kobane. Mereka dan jutaan orang Kurdi merasa bahwa otoritas Turki lebih memilih melihat kelompok monster seperti ISIS memerintah di utara Suriah daripada membantu melindungi Kobane dan warganya dari kejam dan kematian ISIS. Pemicu akhir bagi PKK adalah serangan Suruç pada bulan Juli 2015, di mana seorang pembom bunuh diri ISIS membunuh 32 aktivis muda kiri yang akan mengirimkan bantuan ke Kobane. Gerakan Kurdi menuduh pelaku bom tersebut dihubungkan dengan polisi dan intelijen Turki (Hamsici, 2015). Dalam bentuk balas dendam, kelompok yang loyal pada PKK (*Apocu Fedai Timi*) diduga membalas dengan membunuh dua polisi Turki yang diduga terlibat dalam pembantaian Suruç (Cumhuriyet, 2018). Awalnya PKK mengklaim serangan, tetapi kemudian menariknya. Proses perdamaian resmi dibatalkan dan kedua belah pihak kembali ke perang dengan lebih gila dari sebelumnya. Ini mengingatkan kita bahwa

negosiasi perdamaian bersifat sukarela dan dapat runtuh kapan saja jika salah satu atau kedua belah pihak merasa ingin kembali ke kekerasan (Savran, 2020).

KESIMPULAN

Konflik puluhan tahun yang terjadi antara Pemerintah Turki dengan PKK ini belum menemukan titik terang hingga saat ini. Terdapat beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan yang kemudian mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan. Mulai dari kehancuran Kekaisaran Ottoman pasca Perang Dunia I, lalu dilakukan beberapa perjanjian untuk memecah wilayah bekas Kekaisaran Ottoman. Dari situlah terdapat harapan bagi masyarakat Kurdi yang merupakan salah satu etnis terbesar di wilayah tersebut, untuk merdeka dan memiliki negara berdaulatnya sendiri. Namun siapa sangka kegagalan perjanjian damai tersebut memicu adanya gejolak dari masyarakat Kurdi yang merasa telah dikhianati.

Setelah Turki berubah menjadi negara Republik mereka memiliki tujuan untuk menjadikan identitas Turki sebagai identitas bangsa yang dominan budaya dan mengasimilasi identitas lain ke dalam ke-Turki-an. Adanya diskriminasi budaya dan bahasa semakin meningkatkan rasa kebencian masyarakat Kurdi kepada pemerintah Turki. Pemberontakan mulai dilakukan untuk menuntut adanya kemerdekaan serta menuntut pelanggaran hak-hak masyarakat Kurdi yang mendiami Turki. Dari pemberontakan ini memunculkan berbagai macam gerakan nasionalis Kurdi yang berjuang untuk memenuhi keinginan masyarakat Kurdi. Salah satu gerakan nasionalis yang terkenal akan tindakan agresifnya yaitu PKK. Tidak segan organisasi ini seringkali melakukan pemberontakan-pemberontakan menjurus dengan tindakan terorisme sehingga dari Pemerintah Turki sendiri membalas perlakuan PKK dengan cara koersif. Walaupun pada tahun 2009 pihak Turki telah mengusulkan upaya damai dengan pihak PKK namun ternyata proses damai tersebut tidak bertahan lama dan gagal mencapai kata damai.

Kegagalan upaya damai yang dialami oleh pemerintah Turki dengan PKK terjadi akibat tidak adanya kondisi dan kultur yang kondusif serta gagalnya upaya damai pada tahap *unilateral accommodation*. Kegagalan pada tahap ini terjadi karena salah satu pihak tidak dapat menerima konsesi dari pihak lain. Dalam hal ini Turki sebagai pihak yang memberikan konsesi pertama kali melalui *Kurdish Opening* pada tahun 2009 telah memberikan sinyal damai kepada PKK namun dalam prosesnya hal tersebut gagal karena ada kurangnya komitmen antara dua pihak. Selanjutnya proses damai kembali di terjadi pada tahun 2012, di mana Turki mendeklarasikan *Solution Process* sebagai kelanjutan upaya damai yang diharapkan oleh Turki. Namun kembali lagi gagal karena PKK merasa Turki kurang memenuhi tuntutan mereka sebagai orang Kurdi untuk memberikan pengakuan identitas, otonomi, pengakuan konstitusional serta Pendidikan. Pihak Turki menolak tuntutan tersebut karna ditakutkan PKK akan membangkitkan semangat nasionalis orang Kurdi untuk memerdekakan dirinya sendiri. Sehingga membuat kedua pihak tidak percaya dan proses damai tidak dapat berlanjut ke tahap selanjutnya.

Selain itu berdasarkan teori *Stable Peace* gagalnya upaya damai ini juga terjadi akibat tidak adanya kondisi dan kultur yang kondusif. Adanya pelanggaran hak asasi manusia, tidak adanya demokrasi bagi orang Kurdi serta gagalnya dialog politik membuat proses damai ini sulit tercapai. Orang Kurdi tidak boleh menggunakan bahasa, adat, serta budayanya sendiri di dalam wilayah Turki. Mereka tidak memiliki kebebasan dan selalu menjadi masyarakat

minoritas yang termarginalkan. Kegagalan dialog antara dua pihak terjadi karena tidak dapat mencapai kepentingan masing-masing serta adanya rasa tidak percaya satu sama lain juga menjadi faktor kegagalan upaya damai ini. Kegagalan terjadi karena tidak adanya kemauan satu sama lain untuk mencapai solusi damai yang awet dan berkelanjutan, kondisi politik yang tidak kondusif serta adanya ketimpangan kepentingan antara kedua pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Rosyidin S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura S.I.P., M.P.S. selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Drs. Muhammad Adnan, MA selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing penulis sehingga jurnal ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Aktar, Cengiz. (2014). Turkey's Clumsy Politics and the Kurdish Question. *Al Jazeera*.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2014/9/29/turkeys-clumsy-politics-and-the-kurdish-question>. Diakses pada 01/03/2023
- Akyol, Mustafa. (2021). *How Turkey Lost Its Freedom and Even Its Bread*. CATO Institute.
<https://www.cato.org/blog/how-turkey-lost-its-freedom-even-its-bread-1>
- Al Jazeera. (2015). *Erdogan Criticized Dolmabahce and 10 articles*.
<https://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-dolmabahceyi-de-10-maddeyi-de-elestirdi>.
Diakses pada 10/03/2023
- Bayramoğlu, Ali. (2015). The process of resolution: From politics to arms. *Democratic Progress Institute*.
- Behdinan. (2015). KCK Co-Chair Bayik: PKK Defends Itself. *Bianet News*.
<https://m.bianet.org/english/print/166785-kck-co-chair-bayik-pkk-defends-itself>
- Carnegie Endowment for International Peace. (2009). *The Kurdish Opening in Turkey: Origins and Future?* <https://carnegieendowment.org/2009/12/01/kurdish-opening-in-turkey-origins-and-future-event-1494>
- Crisis Group Europe Report. (2014). Turkey and the PKK: Saving the Peace Process. *International Crisis Group*.
- Çiçek, Cuma. (2018). The Failed Resolution Process and the Transformation of Kurdish Politics. *Middle East Report* 288.
- Çiçek, C. (2011). Elimination or Integration of Pro-Kurdish Politics: Limits of the AKP's Democratic Initiative. *Turkish Studies*, 12(1), 15–26.
<https://doi.org/10.1080/14683849.2011.563498>
- Çiçek, Cuma. (2013). The Pro-Islamic Challenge for the Kurdish Movement. *Dialectical Anthropologi*, 37(1), 159–163.
- Crighton, E. & M.A. Mac Iver. (1991). The Evolution of Protracted Ethnic Conflict: Group Dominance and Political Underdevelopment in Northern Ireland and Lebanon. *Comparative Politics*, 23(2), 39.
- C. Butler & S. Gates. (2009). Asymmetry, parity, and (civil) war: Can international theories of power help us understand civil war? *International Interactions*, 35(3), 330–340.
- Cumhuriyet. (2015). *The murder case of two police officers in Ceylanpınar, which ended the resolution process, also ended in acquittal*. <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cozum-surecini-bitiren-ceylanpinardaki-iki-polisin-cinayeti-davasi-da-beraatle-sonuclandi-935930>
- DW. (2014). *Erdogan: Kobani About to Fall*. <https://www.dw.com/en/turkish-president-says-kobani-about-to-fall-to-is/a-17981034>

- Hafiza Markezi. (2015). Chronology of Peace Process in Turkey. *Hakikat Adalet Hafiza Markezi*. <https://hakikatadalethafiza.org/en/chronology-of-peace-process-in-turkey/>
- Hamsici, Mahmut. (2015). Kandil: The Solution Process can be Restarted it is not Difficult. *BBC News*. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150728_kandil_roportaj
- I.W. Zartman. (2017). States, boundaries and sovereignty in the Middle East: Unsteady but unchanging?. *International Affairs*, 93(4), 937–948.
- Jongerden, Joost. (2017). The Kurdistan Workers Party (PKK): Radical Democracy and the Right to Self-Determination beyond the Nation-State. *Chapter in: The Kurdish Question Revisited*.
- Kupchan, C. (2010). *How enemies become friends: The sources of stable peace*. Princeton University Press.
- Karadeniz, Tulay. (2015). Turkey's Erdogan: Peace Process with Kurdish Militants Impossible. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-turkey-kurds-idUSKCN0Q20UV20150728>
- Meyersson, Erik. (2016). *The Reversal of (What Little) Liberal Democracy (There Ever Was) in Turkey*. <https://erikmeyersson.com/2016/10/04/the-reversal-of-what-little-liberal-democracy-there-ever-was-in-turkey/>
- Mutlu, S. (1996). Ethnic Kurds in Turkey: A Demographic Study. *International Journal of Middle East Studies*, 28(4), 517–541.
- Ozcelik, Dr. Sezai. (2006). *Theories, Practices, and Research in Conflict Resolution and Low Intensity Conflict: The Kurds Conflict in Turkey*.
- Rabar, Ruwayda Mustafa. (2011). What is the Kurdish Question? *Open Democracy*. <https://www.opendemocracy.net/en/what-is-kurdish-question/>
- Rosyidin, M., Sabrina, A., Hanjani, A. A., & Kusumawardhana, I. (2021). Mengapa Negosiasi Internasional Gagal? Menjelaskan Kegagalan Perundingan Denuklirisasi Amerika Serikat-Korea Utara 2019. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 10(1), 34. <https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.34-50.2021>
- Savran, A. (2020). The Peace Process between Turkey and the Kurdistan Workers' Party, 2009–2015. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 22(6), 777–792. <https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1801243>
- U.S. Department of State. (2019). *Country Reports on Terrorism 2019* (Section 2656f (the “Act”); 22 of United States Code).
- V-Dem. (n.d.). *Turkey Liberal Democracy Index 1975-2020*. Retrieved February 12, 2023, from https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/
- Väyrynen, R. (1991). To Settle or to transform? Perspective on the resolution of national and international conflicts. *SAGE*, 1–25.
- Yegen, Mesut. (2011). *The Kurdish Question in Turkey: Denial to Recognition* (76th ed.). Routledge.